



INFO ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



HAK DASAR:
 Sosialisasi Perda
 DIY No. 9 Tahun
 2015 kembali
 digelar Biro Tata
 Pemerintahan
 Setda DIY. Kali
 ini dengan
 sasaran 45
 kader GISA dari
 kemantren
 se-Kota Jogja.

WALAH YUNI@METROKOTA.ID

**Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak
 Dorong Kader GISA Berperan
 Aktif Tertib Adminduk**

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY kembali menyelenggarakan sosialisasi Perda DIY No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kali ini pesertanya 45 kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Mereka berasal dari kemantren (kecamatan, Red) se-Kota Yogyakarta.

"KIA itu penting. Lebih-lebih bagi anak disabilitas," ucap Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu saat bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi yang berlangsung di Unit IX kompleks Kepatihan, kemarin (20/7).

Mantan wakil bupati Sleman ini mewantiwanti agar anak sejak dini terdata dengan baik. Data KIA itu sangat bermanfaat. Anak yang memiliki KIA dapat menikmati berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Namun demikian, dia melihat itu belum dipandang sebagai kebutuhan mendasak.

"Tu hak dasar bagi anak," tegas Neni, sapaan akrabnya.

Menyadari pentingnya KIA, Neni menekankan masyarakat, terutama kader GISA berperan dalam sosialisasi penyelenggaraan adminduk. Kader GISA diminta secara aktif mendorong warga memiliki data kependudukan yang valid.

"Kalau tidak aktif, anak bisa lewat. Tidak punya identitas diri, padahal itu menjadi hak" ingat ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY ini.

Neni sekali lagi mengingatkan, pentingnya tertib adminduk. Juga aktif mengadakan pembaruan. Salah satunya memperbarui data pendidikan terakhir. "Tingkat pendidikan orang itu akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) DIY. Apakah semakin baik kondisi masyarakat di DIY? tanya dia.

Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memaparkan ruang lingkup adminduk beserta dasar hukumnya. Dia juga mengingatkan, pentingnya memperbarui sistem informasi administrasi kependudukan atau disingkat SIAK.

Data SIAK, terang Yuli, demikian dia bisa disapa, penting untuk pemanfaatan pembangunan, demokrasi dan kepastian hukum. Dia mencantumkan misalnya kebutuhan sarana Strata-1 di wilayah tertentu. Data SIAK bisa menjawabnya.

Ditambahkan, berbagai inovasi harus dilakukan demi meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan. Terobosan itu, antara lain dengan mengadakan jemput bola layanan kepada masyarakat. Khususnya terhadap warga yang mengalami kesulitan karena faktor geografis. Atau juga karena disabilitas.

"Kemungkinan penduduk tidak dapat melakukan sendiri sehingga perlu didatangi," tambah dia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcatpil) Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki mengungkapkan, pentingnya memperbarui data kematian dan kelahiran. Itu berkaitan dengan agenda pemilihan umum legislatif, pilihan presiden dan pilkada. Semua diadakan secara serentak pada 2024.

Menurut Septi, dukcatpil memiliki peran penting. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kerja sama menggunakan data direktorat dukcapil untuk pemilu.

"Tidak ada data lain sehingga insan dukcapil mulai sekarang sibuk menertibkan data, mengamankan data," kata mantan Inspektur Pembantu (Irbn) Inspektorat Kota Yogyakarta ini. Dia juga minta GISA berpartisipasi secara aktif ikut menyosialisasikan ke masyarakat agar tertib adminduk. (lan/kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005